



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
(PIPPK) Di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung
Kulon
Kota Bandung**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Chalev Arthatama Seputra

2014310065

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
(PIPPK) Di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung
Kulon**

Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Chalev Arthatama Seputra

2014310065

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M. Si.

BANDUNG

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chalev Arthatama Seputra
NPM : 2014310065
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Program
Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Cibuntu
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juli 2019

Chalev Arthatama Seputra

ABSTRAK

Nama : Chalev Arthatama Seputra
NPM : 2014310065
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

Partisipasi Masyarakat menjadi hal penting dalam terlaksananya pembangunan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang peduli mengenai pentingnya pembangunan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Landasan teori yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan bersumber dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada 5 orang ketua rt / rw, 5 orang tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, 5 orang karang taruna, 5 orang pemberdayaan masyarakat kelurahan dan 5 orang masyarakat. Observasi dilakukan di sekitar Kelurahan Cibuntu. Studi dokumen yang digunakan mengacu pada Perwal no 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Data dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan baik, dimana diwujudkan dengan kehadiran masyarakat dalam rapat musrenbang. Begitu juga dalam pelaksanaan yang diwujudkan dalam bentuk waktu, tenaga dan swadaya makan/minum yang disediakan. pengambilan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berupa manfaat material, sosial dan pribadi. Dan evaluasi yang diwujudkan dengan ikut memberikan saran dan kritik kepada program yang telah terlaksana maupun untuk kegiatan program kedepannya.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, PIPPK, Pembangunan

ABSTRACT

Name : Chalev Arthatama Seputra
NPM : 2014310065
Title : Community Participation in Implementation of PIPPK (Program of Innovation of Development and Regional Empowerment) in Cibuntu Village, Bandung Kulon Sub-District, Bandung City

This research aims to examine how local villagers participate in decision making, execution, benefitting, and evaluating the Development Innovation and Regional Empowerment Program. Theory used to answer the research question being Cohen and Uphoff's on participation. Variables observed being decision-making, execution, benefitting, and evaluation.

This research utilizes the descriptive qualitative method. Data are collected from interviews, field observations, and document studies. Interviewees being five heads of neighborhood, five Family Empowerment and Prosperity activists, five Youth Group members, five village people's empowerment volunteers, and five villagers. Observation was conducted in the Cibuntu Village. The document study used refers to Regulation No. 281 of 2015 concerning the Implementation of the Development Innovation Program and the Empowerment of the City of Bandung. Data are analyzed through a qualitative approach.

Findings show that the villagers participate in decision making by being present in the meetings. Execution being conducted through their contribution of time, energy, as well as food and beverages independent provision. Benefits taken in the forms of material, social, and private. Evaluation is done when the villagers give suggestions and criticisms towards the conducted programs and the next programs.

Keywords: Society Participation, PIPPK, Development

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkannya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M. Si. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa meluangkan waktu dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
2. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis dalam menunjang kegiatan perkuliahan selama ini.
3. Bapak dan mamak yang sudah selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak atas dukungan kalian

untuk saya selama menempuh perkuliahan di Unpar dan menyusun skripsi ini.

4. Andre, David, Lina, Ka Ros dan Gerrard Marpaung selaku abang, kakak dan ponakan saya yang selalu mendorong dan membantu saya dalam hal materil maupun pemikiran positif.
5. Terimakasih kepada Komang Widia yang membantu dalam memberikan ide, masukan, saran dan medorong peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Sahabat-sahabat saya semuanya yang mengenal saya dan saya yang mengenal kalian yang selalu mengingatkan saya untuk selalu fokus kuliah dan cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Keluarga besar yang selalu mendukung saya dalam skripsi ini
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan sripsi ini dan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 16 Juli 2019

Chalev Arthatama Seputra

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	15
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
BAB II	17
KERANGKA KONSEPTUAL	17
2.1 Pengertian Pembangunan	17
2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	18
2.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat	18
2.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	19
2.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat	21
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	23
2.7 Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat	24
2.8 Jenis Partisipasi Masyarakat	25
2.9 Model Kerangka Berfikir	29
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1. Tipe Penelitian	30
3.2 Peran Peneliti	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Operasional Variabel	34
3.5 Sumber Data	36

3.6	Prosedur Pengumpulan Data	37
3.7	Analisis Data	39
3.8	Pengecekan Keabsahan Temuan	40
BAB IV		44
PROFIL PENELITIAN		44
4.1	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)	44
4.2	Prinsip Dasar Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan	46
	PIPPK memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:.....	46
4.3	Prosedur-Tahapan Kegiatan PIPPK:	47
4.4	Gambaran Umum Kelurahan Cibuntu.....	48
4.6	Potensi Wilayah	55
BAB V.....		61
HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI		61
5.1.	Analisis Biografis Informan.....	61
5.1.1.	Jenis Kelamin	61
5.1.2.	Usia Informan	61
5.1.3.	Tingkat Pendidikan.....	62
5.1.4.	Pekerjaan Informan	62
5.2	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung	63
5.2.1	Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan	63
5.2.2	Partisipasi Dalam Pelaksanaan.....	78
5.2.3	Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat	92
5.2.4	Partisipasi Dalam Evaluasi	109
5.3	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung	122
5.3.1	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	122
5.3.2	Partisipasi dalam Pelaksanaan	123
5.3.3	Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat	123
5.3.4	Partisipasi dalam Evaluasi	124
BAB VI.....		125
KESIMPULAN DAN SARAN.....		125

6.1 Kesimpulan	125
6.2 Rekomendasi	126
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir	28
Gambar 5.1 Acara Yatim Piatu Oleh Karang Taruna Kelurahan Cibuntu.....	90
Gambar 5.2 Acara Pembagian alqur'an dan karpet sholat untuk masjid di Kelurahan Cibuntu oleh PKK Kelurahan Cibuntu	92
Gambar 5.3 Acara Pembagian sembako dan penjualan barang layak pakai oleh LPM Kelurahan Cibuntu	95
Gambar 5.4 Kegiatan Perbaikan jalan di RW 1 oleh RT / RW dan masyarakat RW 1 Kelurahan Cibuntu	98
Gambar 5.5 Kegiatan Pembuatan <i>paving block</i> di salah satu RW di Kelurahan Cibuntu oleh Masyarakat Kelurahan Cibuntu	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	34
Tabel 4.1 Data Kondisi Kantor Kelurahan	49
Tabel 4.2 Data Sarana Kerja Kantor Kelurahan	49
Tabel 4.3 Jumlah RT / RW	50
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Usia di Kelurahan Cibuntu	51
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja di Kelurahan Cibuntu	52
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Cibuntu	53
Tabel 4.8 Sarana Pendidikan di Kelurahan Cibuntu	53
Tabel 4.9 Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Kelurahan Cibuntu	54
Tabel 4.10 Kelembagaan Masyarakat di tingkat Kelurahan Cibuntu (diluar RT dan RW)	54
Tabel 5.1 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan (Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan)	63
Tabel 5.2 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan Cibuntu	66
Tabel 5.3 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	68
Tabel 5.4 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Lembaga Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)	71
Tabel 5.5 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Masyarakat Kelurahan Cibuntu	73

Tabel 5.6 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan (Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan)	76
Tabel 5.7 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan.....	78
Tabel 5.8 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan.....	80
Tabel 5.9 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Unit Kelurahan	83
Tabel 5.10 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Cibuntu.....	85
Tabel 5.11 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat (Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan).....	87
Tabel 5.12 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan	91
Tabel 5.13 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan.....	93
Tabel 5.14 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Unit Kelurahan.....	96
Tabel 5.15 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Masyarakat Kelurahan Cibuntu.....	99
Tabel 5.16 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi (Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan)	102
Tabel 5.17 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan.....	105
Tabel 5.18 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan.....	107
Tabel 5.19 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Unit Kelurahan	109
Tabel 5.20 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Masyarakat Kelurahan Cibuntu.....	111
Diagram Pie Chart 5.1 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan	64

Diagram Pie Chart 5.2 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan	67
Diagram Pie Chart 5.3 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan.....	69
Diagram Pie Chart 5.4 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Lembaga Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Unit Kelurahan	72
Diagram Pie Chart 5.5 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Masyarakat Unit Kelurahan.....	74
Diagram Pie Chart 5.6 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan	77
Diagram Pie Chart 5.8 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan	81
Diagram Pie Chart 5.9 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Lembaga Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Unit Kelurahan	84
Diagram Pie Chart 5.10 Kategori Partisipasi Dalam Pelaksanaan Masyarakat Unit Kelurahan	86
Diagram Pie Chart 5.11 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan	88
Diagram Pie Chart 5.13 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unit Kelurahan.....	94
Diagram Pie Chart 5.14 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Lembaga Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Unit Kelurahan	97
Diagram Pie Chart 5.15 Kategori Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Masyarakat Unit Kelurahan.....	100
Diagram Pie Chart 5.16 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan	103
Diagram Pie Chart 5.19 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Lembaga Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)Unit Kelurahan.....	110
Diagram Pie Chart 5.20 Kategori Partisipasi Dalam Evaluasi Masyarakat Unit Kelurahan	112

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pertanyaan Penelitian.....	125
LAMPIRAN 2 Dokumentasi Wawancara.....	127
LAMPIRAN 3 Surat telah melakukan penelitian.....	131
LAMPIRAN 4 Kartu Bimbingan	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan yang meliputi tingkat hidup, kesehatan, pendidikan dan keadilan sehingga dapat menyejahterakan rakyatnya, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Oleh karena itu, dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap sumberdaya alam dan sumberdaya manusia harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Menurut *Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto* “pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa”.¹ Sedangkan Menurut *Sondang P.Siagian* “pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk

¹ Harun, Rochajat dan, Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011, hlm 3

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.²

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat *Conyers* yang lebih lanjut mengemukakan “3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting”:³

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Di Indonesia sendiri kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasilnya. Hal ini telah

² Siagian, Sondang. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Binapura Aksara Jakarta, 2008, hlm 13.

³ Diana Conyers (1981), *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Gajah Mada University Press. hlm 154-155

menjadi salah satu kebijakan pokok pemerintah guna meningkatkan dan menyejahterakan pertumbuhan pada setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan dibentuknya otonomi daerah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah, dimana setiap daerah diberikan otoritas untuk mengelola daerahnya sendiri⁴”.

Salah satu daerah yang semakin pesat pembangunannya di Indonesia dari tahun ke tahun yaitu Kota Bandung yang merupakan Kota terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu Kota Provinsi. Sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung merancang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui inovasi masyarakat dalam menggagas program pembangunan berbasis pemberdayaan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

PIPPK merupakan program yang memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan ruang yang terbuka kepada masyarakat akan menciptakan interaksi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya, peranan masing-masing pihak harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola program/kegiatan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan yang didasari oleh konsep partisipasi

⁴ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

masyarakat agar diberikan ruang kreatif untuk membangun wilayahnya dengan pemberian bantuan Rp. 100.000.000/tahun bagi setiap Rukun Warga (RW), PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna.

Adapun maksud dan tujuan PIPPK menurut Peraturan Walikota Bandung 281 tahun 2015 yaitu “untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan PIPPK adalah mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK berbasis pada pemberdayaan masyarakat”.⁵

Berdasarkan Perwal 281 tahun 2015 BAB V Pasal 5 yaitu penunjang pelaksanaan kegiatan PIPPK, adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Rukun Tetangga (RT)/rukun warga (RW)
2. Lembaga tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP. PKK) Kelurahan
3. Lembaga Karang Taruna unit Kelurahan
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).⁶

⁵ Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 *Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.*

⁶ *ibid*

Berdasarkan jenis kegiatan, ruang lingkup, dan penatalaksanaan barang daerah PIPPK bagian kesatu BAB VI jenis kegiatan dan ruang lingkup PIPPK Pasal 7 RT/RW adalah sebagai berikut:

- a) Infrastruktur, meliputi pembangunan dana atau perbaikan prasarana dan sarana lingkungan lingkup RW, misalnya, pembangunan dana tau pemeliharaan kantor RW, jalan gang, drainase dll sesuai urusan pemerintah umum yang diserahkan walikota
- b) Sosial kemasyarakatan, meliputi pelatihan, penyuluhan/sosialisasi, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain kemasyarakatan sesuai lingkup RW.
- c) Penguatan kelembagaan RW, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi dan perkantoran RW, pelatihan pengurus/kader tingkat RT/RW, peningkatan jejaring (networking) antar RW di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota
- d) Pelaksanaan ketertiban, Kebersihan, Keindahan lingkup RW, meliputi pengadaan dan atau perbaikan/pemeliharaan sarana kerja K-3
- e) Pemberdayaan dan Inovasi ekonomi local, meliputi pelatihan, pendamping dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha meningkatkan keterampilan, kapasitas, kompetensi masyarakat serta kelompoknya dalam memperbaiki kesejahteraan

Jenis kegiatan dan ruang lingkup PIPPK Pasal 8 PKK adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan kelembagaan, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi PKK, pelatihan pengurus/kader PKK dalam rangka peningkatan kapasitas
- b) Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja I PKK yaitu: Mengelola Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong royong
- c) Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja II PKK yaitu: Mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi
- d) Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja III PKK yaitu: Mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga
- e) Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja IV PKK yaitu: Mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat

Jenis kegiatan dan ruang lingkup PIPPK Pasal 9 Karang Taruna adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan kelembagaan, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi, penguatan SDM organisasi Karang Taruna melalui bintek dan pelatihan keterampilan, membangun jejaring/networking antar Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota
- b) Penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, rekreasi, dan kesenian, meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan di kalangan generasi muda

- c) Pengabdian pada masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pemuda/karang taruna dalam kehidupan bermasyarakat
- d) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi pendataan penyandang Masalah Kesos (PMKS) dan Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS
- e) Pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP), meliputi pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan Las/Bubut, keterampilan Sablon, Pelatihan Komputer (Hardware/Software), pelatihan manajemen usaha dalam rangka menciptakan wirausahawan

Jenis kegiatan dan ruang lingkup PIPPK Pasal 10 LPM adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan kelembagaan, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang kegiatan organisasi
- b) Peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di kewilayahan melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- c) Koordinasi proses pembangunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di kelurahan, misalnya pembuatan profil kelurahan, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah kelurahan, dll⁷

⁷ Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 tahun 2015 *tentang pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan kota bandung*

1.2 Identifikasi Masalah

“Gelar Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2018” yang digelar di Sasana Budaya Ganesha, Jl. Tamansari, Bandung, Kamis (13/9/2018), berlangsung meriah. Setiap kecamatan menampilkan pencapaian kinerja dan produk unggulan yang berhasil dikembangkan. Sejumlah produk unggulan yang dipamerkan diantaranya kuliner, fesyen, dan berbagai kerajinan tangan. Pemkot Bandung memberikan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Awards. Untuk kategori Realisasi diraih oleh Kecamatan Sukajadi, kategori Partisipasi oleh Kecamatan Bandung Kulon, kategori Kolaborasi oleh Kecamatan Babakan Ciparay, dan kategori Inovasi oleh Kecamatan Lengkong.⁸

Keberhasilan PIPPK award diukur “dengan indikator keberhasilan beserta target kinerja tahunan yang meliputi”.⁹

- a. Memenuhi kaidah perencanaan partisipatif masyarakat skala mikro yang menjadi prioritas di kewilayahan
- b. Kegiatan bersifat inovatif
- c. Meningkatkannya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
- d. Manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
- e. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan

⁸ Andryan, “Kecamatan Sukajadi, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, dan Lengkong Dianugrahi PIPPK Awards.” <http://humas.bandung.go.id/humas/berita/2018-09-13/kecamatan-sukajadi-bandung-kulon-babakan-ciparay-d> (13.09.2018). Diakses Tanggal 25 September 2018, pukul 19.56.

⁹ Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 *Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung*.

- f. Sebagai salah satu upaya akselerasi pencapaian visi dan misi Kota Bandung sesuai RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Dengan diselenggarakannya penghargaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata program PIPPK ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kecamatan Bandung Kulon sesuai dengan indikator keberhasilan beserta target kinerja tahunan penyelenggaraan sejumlah kegiatan. Sehingga dari berita tersebut peneliti ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Asep Padil Yamin, yang merupakan sub bagian program dan keuangan dari pihak Kecamatan Bandung Kulon menyebutkan bahwa:

*“Khusus untuk Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kita kan dapat penghargaan nih dari Walikota, kemudian yang selanjutnya saya saran kan untuk Kelurahan yang harus dihubungi yaitu Kelurahan Cibuntu. Nah itu baik dari segi konsisten sistem swakelola, kolaborasi, dan tatacara untuk program inovasi nya seperti apa nanti akan dijelaskan pa lurahnya disana, data-data nya dan sebagainya”.*¹⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti memilih penelitian di Kelurahan Cibuntu dalam kegiatan PIPPK karena Kelurahan Cibuntu ini direkomendasi oleh pihak Kecamatan Bandung Kulon karena Kelurahan yang konsisten baik dalam sistem swakelola, kolaborasi, dan inovasi di dalam program PIPPK.

¹⁰ Wawancara dengan Asep Padil Yamin pada 2 november 2018 pukul 10.25 wib

Dengan ini peneliti tertarik meneliti Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cibuntu.

Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur yang merupakan bagian dari pihak Kelurahan Cibuntu, menyebutkan bahwa:

“PIPPK itu diawali dengan rembuk RW, dilaksanakannya pada bulan Desember disitu diundang tokoh masyarakat, ketua RW dan masyarakat terus disitu diidentifikasi masalah misalnya di RW 01 mana yang mau dibangun, contohnya perbaikan jalan gang, gorong-gorong. Setelah dari rembuk RW bulan Januari di akomodir pembangunan apa yang ingin dilaksanakan. RW ada 10 disini di musyawarahkan ditingkat Kelurahan di 10amping mula-mulanya setelah dari tingkat Kelurahan ke tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kota. Muncul DPA anggaran, jadi semua hasil dari PIPPK mau fisik atau non fisik berawal dari rembuk RW, disini pelaksanaannya swakelola maksudnya pelaksanaannya oleh masyarakat sendiri, pihak Kelurahan yaitu berupa bahan material untuk pembangunan infrastruktur dan barang seperti infocus, sound system dan lain-lain.”¹¹

Berdasarkan wawancara yang berhasil didapatkan, peneliti melihat bahwa kegiatan program PIPPK ini melibatkan seluruh pihak yang ada di Kelurahan Cibuntu dalam menghadiri rapat musrenbang untuk membuat usulan kegiatan di dalam PIPPK yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibuntu. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara awal kepada ketua RW di

¹¹ Wawancara dengan Nur pada 2 november 2018 pukul 12.00 wib

Kelurahan Cibuntu untuk melihat apakah ada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam PIPPK.

Peneliti mengindikasikan bahwa terdapat beberapa keterlibatan partisipasi masyarakat dalam PIPPK:

1. Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau usulan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 01 yaitu Ibu Epi sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Menilai bahwa partisipasi masyarakat dilibatkan untuk menjadi pemberi ide atas daftar usulan kegiatan RW 01 di dalam PIPPK*¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 08 yaitu Bapak Maman sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat bermula dari rembug RW usulan apa yang ingin dilakukan misalnya infrastruktur, acara 17an setelah itu masyarakat ikut aktif dalam pekerjaan yang dilakukan berupa swadaya yaitu tenaga, makanan dari situ timbulah untuk memelihara dan merawat pembangunan yang sudah dilakukan sendiri oleh masyarakat*¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 08 yaitu Bapak Maman sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat dalam PIPPK sangat penting karena jika tidak melibatkan masyarakat program ini tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan PIPPK dimana masyarakat terlibat dalam memberikan ide atau usulan kegiatan apa saja yang ingin dilakukan*

¹² Wawancara dengan Epi pada 31 januari 2019 pukul 08.30 wib

¹³ Wawancara dengan Maman pada 31 januari 2019 pukul 12.55 wib

setelah dari itu diberikan bantuan swadaya dari masyarakat berupa tenaga, mamin (makan dan minum) ¹⁴

Hal ini sesuai dengan jenis partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yaitu salah satunya adalah pengambilan keputusan dimana Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam hal memberikan “masukan” terhadap pembangunan.

2. Partisipasi masyarakat dalam memberikan swadaya baik tenaga atau dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 02 yaitu Ibu Euis sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat ikut dalam bantuan berupa swadaya tenaga dalam membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan¹⁵*

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 03 yaitu Ibu Nunung sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur berupa bantuan swadaya dalam bentuk tenaga, makan, minum sehingga bisa terjadi pemberdayaan oleh masyarakat itu sendiri¹⁶*

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 04 yaitu Bapak Syahrir sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat yaitu saling*

¹⁴ Wawancara dengan Wawana pada 31 januari 2019 pukul 14.16 wib

¹⁵ Wawancara dengan Euis pada 31 januari 2019 pukul 09.10 wib

¹⁶ Wawancara dengan Nunung pada 31 januari 2019 pukul 10.00 wib

*bekerja sama atau gotong-royong sangat membantu dalam pembuatan seperti gorong-gorong karena masyarakatnya langsung yang melakukan*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 05 yaitu Bapak Deden sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Awalnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada setiap masyarakat melalui masing-masing ketua RT atau kegiatan seperti arisan ibu-ibu dengan penjelasan apa itu PIPPK masyarakat melakukan apa dananya dari siapa dari situ partisipasi atau keterlibatan masyarakat akan dijelaskan bahwa masyarakat hanya tinggal memberikan bantuan berupa tenaga dalam kegiatan yang akan dilakukan di RW 05 karena alat atau bahan semua dari kelurahan sehingga tinggal eksekusi saja dari program yang telah direncanakan sebelumnya agar dapat berjalan*¹⁸

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dan swadaya, Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa tenaga kerja, uang, barang dan informasi masuk kedalam jenis “partisipasi pelaksanaan” dalam program pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat dalam menjaga program yang sudah terlaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 06 yaitu Bapak Haji Romli sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat dalam PIPPK sangat penting karena warga RW 06 sendiri yang menjaga dan merawat*

¹⁷ Wawancara dengan Syahrir pada 31 januari 2019 pukul 10.40 wib

¹⁸ Wawancara dengan Deden pada 2 november 2018 pukul 13.00 wib

*setiap kegiatan yang dilakukan seperti bangunan infrastruktur gapura atau jalan gang*¹⁹

Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah terlaksana dari program pembangunan di Kelurahan Cibuntu sehingga masyarakat merasakan hasil pembangunan tersebut.

4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program yang sudah terlaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 07 yaitu Bapak Nanang sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Masyarakat ikut mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya secara menyeluruh untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum.*²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW 09 yaitu Bapak Atin sebagai ketua RW menyatakan bahwa: *Partisipasi masyarakat sangat penting sebab pada tahap ini masyarakat memberi masukan demi pelaksanaan program untuk tahun selanjutnya selain itu juga memberikan saran atau pendapat dalam masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan saat dilaksanakan.*²¹

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya dimana bertujuan untuk mengetahui

¹⁹ Wawancara dengan Haji Romli pada 31 januari 2019 pukul 11.15 wib

²⁰ Wawancara dengan Nanang pada 31 januari 2019 pukul 12.00 wib

²¹ Wawancara dengan Atin pada 31 januari 2019 pukul 13.30 wib

ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya dan sebagai respon yang dapat memberikan saran dan kritik demi pelaksanaan yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pentingnya suatu partisipasi dalam suatu program, maka menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cibuntu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Pengambilan Manfaat dan Evaluasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cibuntu?

1.4 Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Pengambilan Manfaat dan Evaluasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cibuntu

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis:

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan bahan pertimbangan serta masukan bagi kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.